

EKSISTENSI KUBE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA MISKIN

JOINT ENTREPRENEURSHIP ON ENHANCING POOR FAMILY SOCIAL WELFARE

Siti Wahyu Iryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia, HP. 085878403038

E-mail: iryanisitiwahyu@gmail.com

Naskah diterima 5 Juli 2016, direvisi 29 Juli 2016, disetujui 9 Agustus 2016

Abstract

This was done to know the implementation of joint-entrepreneur (Kube) program from economic, social, and institutional aspects, and to identify handicap and supporting factors. Research samples chosen were 10 Kube in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT) province, under consideration that in that province the rate of poor families were high and some of them got social assistance from the Ministry of Social Affairs through Kube for poor people. The research was descriptive. The result was the majority of Kube were developing, seen from Kube performance in social aspect the majority (70 percent) seven Kubes having good enough performance, from the economic aspect (50 persen) five Kubes having performance inadequately. From the institutional aspect, five Kube (50 percent) having performance inadequately. The supporting factor of the Kube implementation were the high spirit of the participant, strong solidarity, competent guides, the support of local wisdom and local potential community, that were held by the member of Kube. The handicap factors were the low of human resources of targeted members (their education and skill were limited), geographical condition, and reluctant set up networking. It recommended that the Ministry of Social Affairs, through The directorate of Social empowerment and Poverty Prevention, Central for Social Education Board (BBPPKS), to set up a program on poor families empowerment, developing social, economy, and institutional aspect in balance. It needed intensive guidance on quality and quantity of product to reach Kube development optimum.

Keywords: Existence, Kube, Welfare, Poor Family.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Sampel penelitian dipilih 10 Kube di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pertimbangan keluarga miskin di lokasi ini besar dan di antaranya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial melalui program Kube Fakir Miskin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan, bahwa mayoritas Kube dalam kategori berkembang, ditinjau dari kinerja Kube dari aspek sosial, mayoritas tujuh Kube (70 persen) memiliki kinerja cukup baik. Dari aspek ekonomi, lima Kube (50 persen) memiliki kinerja kurang baik. Dari aspek kelembagaan, lima Kube (50 persen) memiliki kinerja kurang baik. Faktor pendukung pelaksanaan Kube adalah semangat anggota kelompok yang tinggi, kuatnya rasa kebersamaan, adanya pendamping yang kompeten, dukungan masyarakat potensi lokal dan nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh anggota Kube. Faktor penghambat pelaksanaan Kube adalah rendahnya kualitas SDM sasaran (pendidikan rendah, keterampilan dalam mengelola usaha terbatas), kendala geografis, dan lemah dalam membangun networking. Direkomendasi perlunya Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Pusdiklat BBPPKS menyusun program pemberdayaan keluarga miskin, pengembangan aspek sosial, aspek ekonomi dan kelembagaan secara seimbang. Perlu ada pendampingan intensif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas product untuk mencapai perkembangan Kube yang optimal.

Kata Kunci: Eksistensi, Kube, Kesejahteraan, Keluarga Miskin.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan didefinisikan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dilema kemiskinan bersifat multi dimensional yang sangat mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial karena apabila dilema ini dibiarkan atau tidak ditangani secara sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan dapat menjadi pemicu dari permasalahan sosial lain yang lebih kompleks.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik periode 2009 s.d 2013 secara berturut-turut tahun 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15persen), tahun 2010 sebesar 31,02 juta jiwa (13,33 persen) dan pada tahun 2011 sebesar 30,02 juta jiwa (12,49 persen), tahun 2012 sejumlah 29,13 juta jiwa dan pada akhir September 2013 turun menjadi 28,55 juta jiwa.(Biro Pusat Statistik Indonesia, beberapa tahun terbitan). Pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebanyak 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi bulan September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang atau 11,23 persen (BPS, Juli 2016). Dari data tersebut dapat disimpulkan, meski terjadi penurunan persentase, bahwa penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan relatif masih banyak sehingga masalah ini mendesak untuk diatasi.

Sebagai program prioritas penanggulangan kemiskinan terus menerus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa program yang pernah digulirkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah program Prokesra, Program Inpres Desa Tertinggal, Program P2KP untuk masyarakat perkotaan, Program PPK untuk masyarakat pedesaan, Program Kredit Mikro, Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Prasarana Perdesaan, dan Program Beras untuk Keluarga Miskin.

UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial kemudian ditindak lanjuti Perpres No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU RI No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, merencanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) (Kementerian Sosial, 2011).

Kube sebagai pendekatan program penanggulangan kemiskinan dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan keluarga miskin, seperti rendahnya SDM, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran. Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) ini merupakan metode/pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan program penanganan fakir miskin yang meliputi 15 program Kegiatan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota (PMKS keluarga miskin) dalam berwirausaha dan berinteraksi sosial dengan sesama anggota ataupun masyarakat, sehingga pada gilirannya mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup, mengembalikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Jalinan kerjasama dalam Kube diharapkan timbul efek lain, yaitu kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Cara tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam Proses Produksi yang dilakukan oleh para anggota Kube. Dengan demikian, bukan hanya anggota Kube yang meningkat penghasilannya, tapi masyarakat sekitarnya pun merasakan manfaat dengan keberadaan Kube (Departemen Sosial RI, 2003: 2).

Kementerian Sosial RI memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin melalui pendekatan terpadu Kelompok Usaha Bersama (Kube)

dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sejak tahun 2003. Beberapa program kegiatan Kube yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial diprioritaskan pada: Pertama, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi fakir miskin. Kedua, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kube Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin/terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi Kube-Kube fakir miskin, bekerjasama dengan PINBUK sejak tahun 2003.

Dengan upaya di atas diharapkan dapat: 1) meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, 2) mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga fakir miskin, 3) meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan sosial, 4) meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, 5) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah kemiskinan, 6) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dapat dilakukan dengan strategi pemberdayaan fakir miskin dalam arti memungkinkan fakir miskin baik dalam konteks individu maupun kelompok, melalui pemberian bimbingan sosial dan keterampilan teknis ekonomi produktif, pengelolaan manajemen usaha ekonomi produktif, manajemen pemasaran usaha dan pengembangan jaringan usaha, kewirausahaan, keswadayaan, pengembangan pribadi dalam usaha, peranan keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial/UKS serta keterampilan IKS, asesmen kebutuhan, masalah keluarga dan lingkungan.

Setelah Kube dicanangkan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI selama kurang lebih delapan tahun (sejak tahun 2003 s.d tahun 2013), maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di lokasi Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingat di lokasi tersebut termasuk banyak penduduk miskin pada tahun 2013 dan terdapat program penanggulangan kemiskinan melalui Kube. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana

gambaran pelaksanaan kinerja Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan dampak Kube terhadap anggota, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kube.

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek kinerja aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan dampak terhadap anggota Kube, serta faktor pendukung dan penghambat. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pertama, sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku pengambil/Pembuat Kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kube. Kedua, sebagai upaya pengembangan teoritik dan pengembangan pengetahuan praktek di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku pengambil Kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kube. Hasil penelitian ini juga dapat memberi masukan kepada Pusdiklat (BBPPKS) terkait dengan penyelenggaraan diklat pendampingan dan diklat terhadap sasaran Kube serta masukan kepada Dinas Sosial terkait dengan implementasi Kube yang efektif. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian yang relevan.

Kemiskinan dalam konsep kesejahteraan sosial, dimaknai sebagai masalah sosial yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud menurut UU no 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemiskinan

merupakan persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahan secara integral. Seperti yang dikemukakan Jamasy (dalam Heru Nugraha, 2000) bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tentu juga politik. Sehingga tidak mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka, seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Booth dan Mc Cawley (dalam Supriyatna Tjahya, 1997:82), mengemukakan bahwa suatu keadaan dikatakan miskin apabila ditandai oleh kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Heru Nugroho (2000) menambahkan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya.

Kementerian Sosial mengkategorikan 14 variabel untuk menentukan kriteria kemiskinan. Kemiskinan memiliki hubungan yang representatif dengan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan. Untuk menjelaskan kriteria kemiskinan dan menentukan ukuran rumah tangga yang layak dalam kategori miskin sekaligus untuk menentukan tingkat keparahan kemiskinan dikategorikan dalam variabel sebagai berikut,

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain.
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata

air tidak terlindungi /sungai /air hujan.

6. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
7. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar /arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, ayam, dan susu dalam seminggu.
9. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
10. Hanya membeli satu stel pakaian baru setahun.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya, dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,-/bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000,- seperti sepeda motor (kredit /non kredit), emas, ternak, kapar motor, atau barang modal lainnya (Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI, 2010:7)

Berdasarkan beberapa kajian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang menghambat seseorang, kelompok maupun masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya sehingga tingkat kesejahteraan dan kualitas hidupnya rendah. Kemiskinan menurut PROPENAS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronik (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural (*structural poverty*), yang terjadi terus menerus dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis dan bencana alam.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan sumber daya ekonomi (Suyanto, 1995:2011). Kemiskinan

kultural bukan bawaan melainkan akibat dari ketidak mampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat pada akar kemiskinan yang terletak pada ketidakmampuan sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diiringi dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan structural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah perseorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksplorasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumberdaya, tetapi juga hanya berpihak pada orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan politik.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan structural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan sumber daya ekonomi (Suyanto, 1995: 201). Kemiskinan kultural bukan bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat pada akar kemiskinan yang terletak pada ketidakmampuan sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diiringi dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan structural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah perseorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksplorasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumberdaya, tetapi juga hanya berpihak pada orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan politik.

Salah satu wujud program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 1983 adalah pembentukan kelompok usaha Bersama (Kube). Dengan pemberdayaan melalui pendekatan kelompok, keluarga miskin dapat memperoleh keuntungan ganda, yakni keuntungan ekonomi dan keuntungan

sosial. Sebagaimana tujuan pembentukan Kube, yakni diarahkan pada upaya penghapusan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas SDM, pendapatan, pengembangan usaha, peningkatan kemampuan berusaha anggota, serta peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantaranya para anggota dengan lingkungan masyarakat.

Indikator keberhasilan Kube sebagai wahana usaha yang dikelola secara bersama oleh keluarga miskin (keluarga binaan) antara lain tercermin pada peningkatan taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, meningkatnya keterampilan pemecahan masalah, meningkatnya dinamika sosial, terjalannya kerjasama anggota Kube dengan masyarakat sekitar, mantapnya usaha dan beragam jenis usaha, meningkatnya pendapatan, tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab sosial serta kesetiakawanan sosial (Warto, dkk, 23; 31).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan tentang pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teknik deskriptif dalam bentuk siklus, simultan, alami dan wajar mulai dari *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification* (Mill dan Huberman dikutip Sunit Agus Tri Cahyono, 2010: 39). Analisis data dilakukan sejak dalam proses pengumpulan data sampai setelah pengumpulan data di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kupang dan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi penelitian karena menurut data dari BPS jumlah penduduk miskin relative banyak yakni hingga tahun 2012 sejumlah 29,13 juta jiwa dan pada akhir Maret 2013 turun menjadi 28,07 juta jiwa (BPS dalam angka tahun 2013). Dengan melihat permasalahan tersebut, maka Kementerian Sosial RI, memberdayakan penduduk miskin melalui Kube. Pelaksanaan pemberdayaan program kemiskinan melalui

Kube disesuaikan dengan potensi/sumber lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Secara teknis, setiap lokasi diambil 10 Kube Fakir Miskin yang berdiri antara tahun 2005–2009 sebagai sasaran analisis. Asumsinya, Kube tersebut telah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh anggota Kube maupun masyarakat sekitarnya serta telah dapat menggulirkan bantuan kepada kelompok baru.

Responden penelitian adalah anggota dan pengurus Kube, karena mereka adalah sumber data primer yang dianggap punya kompetensi untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan dan manfaat Kube. Dari informasi yang diberikan responden penelitian akan diperoleh data yang menggambarkan kinerja Kube dalam pemberdayaan keluarga miskin beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pengelolaan Kube sebanyak 60 orang. Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini berupaya menggali informasi dari berbagai informan yang dipih secara purposive. Informan dimaksud meliputi aparat pemerintah desa, pejabat/instansi terkait, pendamping, orsos/relawan sosial, tokoh masyarakat/kader perempuan dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan Kube), sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kinerja Kube dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan beserta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Kube.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau di antaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Dari pulau-pulau yang ada, 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, Di antara 432 pulau yang sudah bernama, terdapat 4 pulau besar, yaitu: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil, antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/ Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada),

Tabel 1
Metode dan Teknik Pengumpulan Data

No	Variabel/ Aspek	Indikator	Sumber	Teknik Pengumpulan Data	Alat Pengambilan Data
1	Aspek Sosial	-motivasi kelompok -kerja sama antar anggota KUBE dan antar KUBE -kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab sosial -iuran kesetiakawanan sosial(IKS) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) -kaaktifan anggota KUBE -perubahan perilaku positif (tentang pendidikan, kesehatan, gizi makanan dan kebersihan lingkungan	- Anggota/ Pengurus Kube - Pendamping - Petugas -Masyarakat	-Wawancara -Observasi -Angket -Dokumentasi	-Panduan wawancara -Panduan observasi

2	Aspek Sosial	-persepsi terhadap dana stimulan UEP -intensitas usaha dan jumlah jenis usaha -peningkatan kualitas <i>Product</i> -kemampuan mengakses sumber dan potensi (ekonomi), -kemampuan merencanakan usaha -melihat peluang pasar -kemampuan pemupukan modal -kemampuan menabung, peningkatan usaha simpan pinjam -kemampuan menjalin kerja sama (kemitraan usaha)	-Anggota/ Pengurus KUBE -Pendamping -Petugas -Masyarakat	- Wawancara - Observasi -pengisian angket	- Panduan wawancara - Panduan observasi
3	Aspek Kelembagaan	- kepengurusan dan pembagian tugas - pengadministrasian - <i>Process</i> pengambilan keputusan -pertemuan anggota -pemeliharaan (sarana, prasarana, peralatan) -perencanaan usaha -peningkatan SDM, pengelolaan keuangan -kemitraan dan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pelaporan).	-Anggota/ Pengurus KUBE -Pendamping -Petugas -Masyarakat	-Wawancara -Observasi -pengisian angket	- Panduan wawancara - Panduan observasi

Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur) dan sebagainya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi NTT di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabupaten Kupang terletak antara 121° 30' BT – 124° 11' BT dan 9° 19' LS – 10° 57' LS. Adapun batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut: Utara dan Barat dengan laut Sawu, Selatan dengan Samudera Hindia dan Timur dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste. Kabupaten Kupang mencakup 27 pulau, dimana di antaranya terdapat 8 pulau yang belum memiliki nama. Hingga saat ini hanya lima pulau yaitu Pulau Timor, Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Semau, dan Pulau Kera yang telah dihuni. Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang

umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 45°. Sedangkan ketinggian Kabupaten Kupang permukaan laut adalah antara 0 - 500 meter. Sebagian besar flora di kabupaten ini terdiri dari rumput, pohon lontar, pohon pinus, cendana, dan gewang. Fauna terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing, babi, domba, ular, dan unggas diantaranya ayam, burung kakatua, nuri dan sebagainya.

Berkait dengan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kupang, terdapat beberapa jenis permasalahan sosial menonjol yang perlu mendapatkan penanganan segera, diantaranya sebagai berikut.

Tabel. 2
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang

No.	Nama PMKS	Jumlah
1.	Fakir Miskin	58.033
2.	Keluarga Yang ditinggal Di Rumah Tidak Layak Huni	5.273
3.	Anak Terlantar	1.204

4. Penyandang cacat	2.798
5. Eks-Narapidana	299

Sumber: BPS Provinsi NTT

Permasalahan kesejahteraan sosial paling menonjol adalah sosial fakir miskin diikuti keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat kondisi mereka yang hidup di bawah garis kemiskina sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka merasa berat apalagi untuk membangun rumah yang layak. Dengan melihat permasalahan tersebut maka Kementerian Sosial menyanangkan salah satu program penanggulangan kemiskinan, yakni melalui Kube. Partisipasi masyarakat dalam program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial terutama anggota dan masyarakat sekitar. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui KUBE tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak dari tingkat atas hingga masyarakat lokal sehingga harapan pemerintah untuk menanggulangi kemiskina atau paling tidak mengurangi jumlah warga miskin dapat terwujud.

Secara geografis Kota Kupang terletak di antara 10° 36' 14" - 10° 39' 58" Lintang Selatan (LS) dan 123° 32' 23" - 123° 37' 01" Bujur Timur (BT) sedangkan Kondisi geografis 180, 27 km² atau 18 027 Ha. Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian selatan berkisar antara 100 – 350 meter. Daerah terendah di atas permukaan laut di bagian utara antara 0 - 50 meter dan tingkat kemiringannya 15 persen. Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2012 sebanyak 291.794 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 147.872 jiwa dan perempuan sebanyak 143.922 jiwa. Berikut disajikan beberapa jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Kupang.

Tabel. 3
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Kupang

No.	Nama PMKS	Jumlah
1.	Fakir Miskin	22.479
2.	Keluarga Yang ditinggal di Rumah Tidak Layak Huni	2.296
3.	Anak Terlantar	213
4.	Eks-Narapidana	700
5.	Penyandang cacat	512

Sumber: BPS NTT

Diketahui fakir miskin sebagai masalah kesejahteraan sosial utama yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan di Kota Kupang. Salah satu strategi untuk menanggapi masalah kemiskinan di kota ini dengan melalui pendekatan kelompok usaha bersama (Kube). Penanggulangan kemiskinan melalui Kube ini dilandasi pertimbangan adanya keterbatasan yang melat pada keluarga miskin. Dengan pendekatan kelompok diharapkan mereka mampu meningkatkan kemampuan berwirausaha dan, menjalin relasi kerja, dan berinteraksi sosial dengan sesama anggota dan masyarakat yang pada gilirannya dapat menumbuhkan taraf kualitas hidup.

2. Karakteristik Responden

Salah satu cara untuk mendeskripsikan pola penyebaran umur responden adalah dengan melihat usia yang mencerminkan kondisi produktif atau tidak produktif seseorang, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Pengelompokan/komposisi umur ini terutama untuk mengetahui atau dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa seseorang memiliki produktivitas kerja yang dipandang ideal

Tabel 3
Kelompok Umur Responden

No.	Kelompok Umur	F	persen
1	20 – 24	-	-
2	25 – 29	3	5
3	30 – 34	11	18,3
4	35 – 39	13	21,7
5	40 – 44	12	20
6	45 – 49	14	23,3
7	50 – 54	6	10
8	55 – 59	1	1,7
9	60 keatas	-	-
TOTAL		60	100

Sumber: data primer

Dilihat dari kelompok umur responden, mayoritas responden di lokasi berada pada rentang usia produktif (25-49 tahun). Pada rentang usia ini responden diasumsikan memiliki produktivitas tinggi, di dalam bekerja dan di dalam mengembangkan usaha bersama dengan kelompok, sehingga Kube yang dikelolanya dapat berkembang secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Data

di atas menunjukkan, bahwa mayoritas responden penelitian telah sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yaitu berada pada rentang usia produktif. Ini berarti bahwa, Kube yang dilaksanakan di lokasi penelitian relatif tepat sasaran. Dengan ketepatan sasaran ini diharapkan Kube dapat berkembang dengan baik dan dapat mencapai hasil yang optimal.

Pendidikan berkait dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan seseorang, maka kualitas SDM nya semakin baik. Tingkat pendidikan responden disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	F	Persen
1	Tidak Sekolah	-	-
2	Tidak Tamat SD	-	-
3	Tamat SD	27	45
4	Tamat SLTP	19	31,7
5	Tamat SLTA	14	23,3
6	Sarjana Muda	-	-
7	Sarjana	-	-
Total		60	100

Sumber: Data primer

Dipandang dari aspek sumber daya manusia (SDM) atau teori *human capital*, tingkat pendidikan seseorang memiliki peluang yang lebih luas dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja, khususnya di berbagai macam kegiatan/usaha sosial ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin berkembang pula tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kerja di bidang usaha, serta semakin besar pula peluangnya untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih menguntungkan, tidak terkecuali di dalam kelompok usaha bersama.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa hampir 57 persen responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan responden diindikasikan sebagai salah satu penyebab timbulnya masalah di lingkungan kelompok usaha bersama mereka. Salah satu masalah dasar yang dihadapi mereka adalah yang berkaitan dengan konteks *input* khususnya kemampuan

dalam pemahaman atas permasalahan yang hadapi dan akibat yang ditimbulkan, serta hambatan mengembangkan potensi yang miliki. Bergabungnya dalam kelompok Kube dan dengan adanya pendampingan sosial dan pembinaan dari instansi terkait, diharapkan mereka lebih mampu mengtasi permasalahan yang dihadapi dan semakin meningkat kemampuan dalam menjalankan peran sosial ekonomi, terutama usaha ekonomi produktif, sehingga kemampuan anggota Kube dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan anggota kelompok, kualitas pangan, kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan sosial lain. Jenis pekerjaan yang ditekuni responden penelitian di lokasi disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	F	Persen
1	Petani/buruh tani	14	23,3
2	Peternak	3	5
3	Pedagang	9	15
4	Nelayan	6	10
5	Karyawan /swasta	-	-
6	Supir/tukang ojek	4	6,7
7	Pertukangan	5	8,3
8	Pengrajin	-	-
9	Tukang becak	-	-
DII		19	31,7
Total		60	100

Sumber: Data primer

Sebagian besar responden bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun hanya sebagai buruh tani, yakni sebanyak 14 responden atau sebesar (23,3 persen), disusul dengan jenis pekerjaan sebagai pedagang yakni sebanyak sembilan responden atau sebesar (15 persen). Jenis pekerjaan pokok yang ditekuni responden biasanya mempengaruhi jenis usaha tambahan sebagai anggota Kube. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani, menekuni Kube pertanian karena di bidang tersebut responden sudah menguasai teknik pertanian. Responden yang menekuni jenis usaha perdagangan namun memilih ikut dalam Kube ternak babi karena mereka beranggapan ternak babi dianggap sebagai jenis usaha sampingan cukup menguntungkan,

mengingat jangka waktu enam bulan, babi dapat segera di jual dan dapat dinikmati hasilnya

Penghasilan yang diterima oleh responden dilihat penghasilan sebelum dan setelah mengikuti program Kube apakah mengalami peningkatan atau tidak seperti dipaparkan dalam table berikut.

Tabel 6

Penghasilan Responden Sebelum dan Sesudah menjadi Anggota Kube

No.	Penghasilan rerata perbulan (Rp)	Sebelum Menjadi Anggota Kube		Sesudah Menjadi Anggota Kube	
		f	persen	F	persen
1.	≤ 400.000	45	75	27	45
2.	401.000 - 500.000	8	13.3	12	20
3.	501.000 – 600.000	3	5	7	11.7
4.	601.000 – 700.000	1	1.7	2	3.3
5.	701.000 – 800.000	3	5	7	11.7
6.	801.000 – 900.000	-	-	-	-
7.	901.000 – 1.000.000	-	-	4	6.7
8.	> 1.000.000	-	-	1	1.6
	Jumlah	60	100	60	100

Sumber: Data primer

Terjadi perubahan pendapatan pada responden atara sebelum dan sesudah menjadi anggota Kube, meskipun perubahan tersebut tidak mencolok secara kualitas, mengingat peningkatan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan minimal keluarga. Sebagai gambaran pada pendapatan paling rendah, yaitu sebanyak ≤ 400 ribu ditemukan sebanyak 27 orang setelah menjadi anggota Kube. Hal ini terjadi penurunan 40 persen pada responden berpenghasilan paling rendah. Sebaliknya terjadi peningkatan persentase responden sebesar 133 persen atau empat orang pada penghasilan antara 701.000 – 800.000. Demikian juga ditemukan empat orang setelah menjadi anggota Kube berpenghasilan 901.000 – 1.000.000,-.

Sebagian besar responden (48,3 persen) mempunyai tanggungan sebanyak 5-6 orang seperti dipaparkan dalam table berikut.

Tabel 7

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

No.	Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Kabupaten Kupang (NTT)	
		f	Persen
1	1-2	-	-
2	3-4	23	38,3
3	5-6	29	48,3
4	7-8	8	13,4
	Jumlah	60	100

Sumber : data primer

Apabila dibandingkan dengan Upah Minimal Regional (UMR) yang ditetapkan untuk wilayah Kupang, yaitu sebanyak Rp. 1.500.000,-/bulan, seluruh anggota Kube memiliki penghasilan di bawah UMR. Hal ini berarti meskipun terjadi peningkatan penghasilan setelah menjadi anggota Kube, mereka tetap miskin. Kondisi ini semakin parah ketika merek harus menanggung dan menghidupi lima sampai enam orang dalam keluarga.

3. Profil Kube

Berdasar **kategorisasi**, 10 Kube semua Kube di Kabupaten/Kota Kupang (100 persen) tergolong kategori berkembang seperti dipaparkan pada tabel berikut.

Disebut Kube berkembang ditunjukkan dengan kepemilikan buku administrasi cukup lengkap namun dalam pencatatan kegiatan, ada yang cukup lengkap /terinci administasi tetapi ada juga yang kurang terinci. Pengurus dan anggota cukup memahami tugasnya. Ada Kube yang memiliki uraian tugas yang jelas dan tertulis dan ada yang tidak memiliki uraian tugas yang jelas namun tidak tertulis. Pemilikan aset secara umum bertambah. Kegiatan yang cukup berkembang di lokasi Kupang, Nusa Tenggara Timur antara lain dengan adanya usaha membuka warung sebagai sarana pengembangan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota Kube.

Keberadaan Kube dalam kategori berkembang merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Kube mandiri. Upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan segala hal antara lain struktur organisasi, tata kerja pembagian tugas yang jelas secara tertulis, memiliki aturan yang jelas hasil

musyawarah bersama (surat kesepakatan bagi hasil, persyaratan dan peraturan bagi pemohon pinjaman). Pengadministrasian kegiatan usaha bersama secara lengkap/rinci dan jelas, adanya berbagai catatan kegiatan yang terlihat dalam berbagai buku daftar pengurus dan anggota, buku tamu, buku daftar hadir dan notulen rapat, buku inventaris, buku surat keluar/masuk, buku kas, UEP kelompok, buku kas simpan pinjam, buku kas tabungan pribadi masing-masing anggota, buku kegiatan kelompok, buku kas IKS (UKS). Perkembangan Kube dari kategori tumbuh menjadi berkembang hingga Mandiri memerlukan waktu antara empat hingga enam tahun.

memfokuskan pada usaha ternak sapi yaitu Kube Jati diri dan Kube Sinar bergerak di bidang usaha pertanian. Dua Kube tersebut yang seharusnya beranggotakan 10 orang, dalam kenyataannya memiliki anggota 20 orang. Hal itu tidak sesuai dengan persyaratan yang menyebutkan, bahwa keanggotaan Kube maksimal adalah 10 orang atau 10 KK. Melihat kondisi tersebut baik Dinas Sosial maupun pendamping Kube menyerahkan sepenuhnya pada kelompok sesuai dengan kearifan lokal masing-masing berdasarkan keputusan bersama. Beberapa jenis usaha yang paling banyak ditekuni Kube di daerah ini adalah bidang peternakan (sapi, babi, kambing dan

Tabel 8
Kategorisasi Kube di Kota/Kabupaten Kupang

No.	Nama	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Lokasi Keterangan	Kategori KUBE
1	Tunas Baru	2008	Peternakan Babi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
2	Kasih	2008	Peternakan Babi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
3	Robadeo	2007	Peternakan Sapi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
4	Kios Murah	2008	Perkiosan/ pertokoan	10 Orang	Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
5	Usaha Mekar	2008	Perkiosan/ Pertokoan	10 Orang	Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
6	Pelita Kasih	2008	Peternakan babi/ ayam, Usaha Tenun dan Sanggar	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
7	WSehati	2008	Peternakan Babi, Perkiosan/ Warung	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
8	Merpati	2008	Perkiosan	10 Orang	Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
9	Jati Diri	2009	Peternakan kambing dan babi	20 Orang	Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang	Berkembang
10	Sinar	2008	Pertanian	20 Orang	Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Berkembang

Diketahui delapan Kube berlokasi di Kota Kupang dan dua Kube di Kabupaten Kupang. Satu Kube yang di Kabupaten Kupang

ayam). Sementara usaha di luar sektor pertanian yang dikembangkan adalah sektor perdagangan dengan jenis kegiatan perkiosan.

Kinerja Kube, menggambarkan pelaksanaan kegiatan Kube dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam pengukuran kinerja Kube terdiri dari tiga gradasi, yaitu baik, cukup dan kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Aspek Sosial terdiri atas indikator: Motivasi berkelompok, kerja sama antar anggota Kube dan antar Kube, kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial, luran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), keaktifan anggota KUBE dalam kegiatan kemasyarakatan, perubahan perilaku positif (tentang pendidikan, kesehatan, gizi makanan dan kebersihan lingkungan). Terdiri dari 7 item pertanyaan, nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 21. Kinerja Kube dari aspek sosial dinilai baik apabila mendapat skor antara (17–21), cukup apabila mendapat skore antara (12-16), kurang apabila mendapat skor (7-11).

apabila mendapat skor antara 10-16.

Aspek Kelembagaan terdiri atas indikator: kepengurusan dan pembagian tugas, pengadministrasian, Process pengambilan keputusan, pertemuan anggota, pemeliharaan (sarana, prasarana, peralatan), perencanaan usaha, peningkatan SDM, pengelolaan keuangan, kemitraan dan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pelaporan). Terdiri atas 14 item nilai terendah 14 dan nilai tertinggi 42, kinerja Kube dari aspek Kelembagaan dinilai baik apabila mendapat skor antara 33-42, cukup mendapat skor antara 23-32 dan kurang mendapat skor 14-22. Gambaran kinerja KUBE secara rinci dapat dilihat pada tabel. 21 sebagai berikut,

Tabel 9
Kinerja Kube pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

No.	Aspek	Lokasi				Jumlah (f)	Kesimpulan Umum
			Baik f (%)	Cukup f (%)	Kurang f (%)		
1.	Sosial	NTT	-	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)	Kinerja KUBE dari Aspek Sosial Cukup
2.	Ekonomi	NTT	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)	Kinerja KUBE dari Aspek Ekonomi Kurang
3.	Kelembagaan	NTT	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)	Kinerja KUBE dari Aspek Kelembagaan Kurang

Aspek Ekonomi terdiri atas indikator, persepsi terhadap dana stimulan UEP, intensitas usaha dan jumlah jenis usaha, peningkatan kualitas *Product*, kemampuan mengakses sumber dan potensi (ekonomi), kemampuan merencanakan usaha, melihat peluang pasar, kemampuan pemupukan modal, kemampuan menabung, peningkatan usaha simpan pinjam, kemampuan menjalin kerja sama (kemitraan usaha). Terdiri atas 10 item pertanyaan, nilai terendah 10 dan tertinggi 30. Kinerja Kube dari aspek ekonomi dinilai baik apabila mendapatkan skor antara 24-30, cukup apabila mendapat skor antara 17-23 dan kurang

Ditinjau dari Aspek sosial, menunjukkan bahwa sebanyak tujuh Kube (70 persen) memiliki kinerja cukup baik, tiga Kube (30 persen) kurang kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja Kube dilihat dari aspek sosial cukup baik, namun demikian tidak ditemukan Kube berkategori baik. Temuan di lapangan menunjukkan setiap anggota membayar iuran dana pada setiap tahun sebagai Dana Kesejahteraan Sosial kepada anggota Kube. Dana tersebut digunakan untuk bantuan setiap anggota yang mengalami musibah, meskipun nilainya relatif kecil tapi cukup berarti, karena merasa

diperhatikan dan mendapat bantuan pemecahan masalah sehingga mengurangi beban keluarga.

Dari Aspek Ekonomi menunjukkan, bahwa sebanyak satu Kube (10 persen) kinerjanya dalam kategori baik, empat Kube (40 persen) kinerjanya dalam kategori cukup dan sebanyak lima Kube (50 persen) dalam kinerjanya dalam kategori kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja Kube dilihat dari aspek ekonomi dalam kategori kurang baik. Temuan di lapangan, Kube yang kinerjanya baik, cukup baik dan kurang ada pada kategori berkembang yang memiliki keberlanjutan usaha, adanya upaya peningkatan kualitas *product*, kawasan, cukup dapat melihat peluang pasar walaupun belum maksimal hasil usahanya. Sudah mulai membangun kerjasama dalam pemasaran, yang tampak pada adanya kerja sama antara Kube dalam melayani pelanggan. Jangkauan pemasaran sudah mulai di luar lingkungan selain Kube walaupun belum optimal. Untuk meningkatkan usahanya Kube mengakses dana usaha dari luar terutama untuk usaha simpan pinjam. Dengan adanya simpan pinjam, secara ekonomi dapat menjadikan peningkatan modal usaha Kube meskipun terbatas jumlahnya, serta keberadaan Kube yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Dari aspek kelembagaan menunjukkan, bahwa lima Kube kinerjanya kurang baik (50 persen), empat Kube (40 persen) cukup dan satu Kube (10 persen) baik. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja Kube dilihat dari aspek kelembagaan dalam kategori kurang baik. Kinerja Kube pada kategori kurang terlihat dari indikator lemahnya dalam pengadministrasian (buku kurang lengkap dan pencatatan kurang rinci), uraian tugas kurang jelas dan kurang dipahami oleh pengurus, dalam pengendalian Kube kurang dilakukan evaluasi kegiatan dan laporan kurang lengkap, kemitraan terbatas, tidak menginventarisasi sumber atau kurang biasa mengakses sumber untuk perkembangan Kube, pengelolaan aset kurang memadai terbukti ada aset yang mengalami kerusakan tidak diperbaiki/diganti. Pada Kube pada kategori cukup baik, terlihat dari indikator: Kube memiliki buku administrasi cukup lengkap dan pencatatan cukup terinci, pengurus dan

anggota cukup memahami tugas yang dibebankan kepadanya, dapat menjalin kemitraan dengan berbagai sumber untuk perkembangan Kube (namun perlu ditingkatkan), sarana dan prasarana yang dimiliki Kube cukup memadai dan dapat menunjang kegiatan usaha serta pengelolaan aset dan keuangan cukup memadai sehingga aset yang dimiliki tidak berkurang. Kube pada kategori baik, terlihat dari sarana administrasi lengkap dan pencatatan terinci, jalinan kemitraan berkembang lebih luas dan pengelolaan aset modal dan keuangan relatif lebih baik.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kube.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan usaha kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program Kube, yakni: Semangat anggota kelompok yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kube seperti keaktifan anggota Kube dalam mengadakan kegiatan/ pertemuan rutin, kedisiplinan anggota Kube dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Kube. Kuatnya rasa ikatan persaudaraan di antara anggota Kube, tercermin dari sikap saling membantu/tolong-menolong, gotong royong dan kerjasama yang baik. Semangat kerjasama dan gotong royong tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kelompok seperti arisan dan simpan pinjam.

Adanya pendampingan sosial yang selalu berusaha menjalin relasi sosial di antara pendamping, anggota Kube dan masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat akses dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di lokasi penelitian. Ada dukungan dari tokoh masyarakat lokal di sekitar Kube baik berupa tenaga, waktu, dan pembinaan. Masih tingginya minat masyarakat miskin untuk dapat berkembang bersama dalam program Kube. Interaksi sosial yang tinggi atas dasar kesamaan visi dan pandangan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Terdapatnya sumber

potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan secara bersama.

Dukungan segenap elemen dan tokoh masyarakat dalam pembentukan Kube di tingkat Desa/ Kelurahan. Terdapatnya sistem atau jaringan kerja kelembagaan serta keberfungsian pendamping dalam mengarahkan dan membimbing Kube sehingga kinerja Kube relatif meningkat/lebih baik di masa mendatang. Kearifan lokal masyarakat yang terus dapat dikembangkan secara bersama-sama. Adanya Perda No 14/ Tahun 2011 tentang keterlibatan semua sektor dalam penanganan kemiskinan namun dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui program Kube ini adalah: Rendahnya tingkat pendidikan anggota kelompok, yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan Kube relative kurang, hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukannya kurang bisa berkembang secara optimal. b) Terbatasnya kemampuan diversifikasi usaha, responden terbiasa dalam kondisi sebelumnya dan tidak berani berspekulasi untuk membuka usaha yang baru. Rendahnya mobilitas yang menyebabkan sempitnya pemasaran hasil usaha, kondisi ini merupakan penyebab kecilnya daya serap dana bantuan secara maksimal. Dana bantuan yang diperoleh cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif dibanding usaha produktif. Adanya sikap iri hati dari masyarakat yang tidak menjadi anggota Kube sehingga dapat mempengaruhi/menghambat anggota Kube dalam melakukan kegiatan program yang telah disepakati. Kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota Kube dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya mendorong terjadinya rendahnya partisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota Kube dan kurang kondusifnya iklim kerja di kelompok.

Faktor penghambat lain adalah budaya rasa kurang saling percaya di antara para anggota Kube yang berasal dari marga yang berbeda. Apabila anggota Kube terdiri dari berbagai etnis dan beragam karakter, budaya dan istiadat yang berbeda, berimplikasi pada perbedaan strategi dalam mengembangkan usaha Kube. Kondisi

geografis yang kurang mendukung sehingga komunikasi menjadi kurang lancar antara Kube dengan pembina dan atau pendamping. Process pembentukan Kube yang relatif lemah dalam asesmen, sehingga kegiatan Kube kadang tidak berdasar kebutuhan riil anggota Kube dan tidak sepenuhnya diawali dengan pemberian kegiatan bimbingan penyuluhan sosial, pelatihan manajemen usaha, UEP, IKS dan UKS. Muatan kegiatan lebih banyak bermeterikan tertib administrasi organisasi. Lemahnya anggota Kube dalam merencanakan program kegiatan usaha, manajemen organisasi, dan rendahnya kemampuan mendistribusikan hasil produksi Kube ke berbagai institusi ekonomi sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan menjalin relasi kerja (*networking*). Masih lemahnya *community organizing* pendamping Kube terhadap dinamika kerja organisasi Kube. Belum ditemukannya pola komunikasi yang efektif dalam membangun kerjasama antara anggota Kube. Sistem sosial budaya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi/urgensi Kube. Sistem kerja kelompok yang belum tertata dengan baik ditingkat internal dan anggota belum secara penuh dilibatkan dalam setiap kegiatan. Manajemen pengelolaan dan sistem pengadministrasian Kube yang relatif masih sederhana, meskipun di beberapa Kube telah ada sistem yang relatif baik.

D. SIMPULAN

Mengacu hasil penelitian Kube di lokasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Ditinjau dari kategori Kube, dari 10 Kube yang diteliti di lokasi penelitian, mayoritas Kube termasuk dalam kategori berkembang. Kinerja Kube dari aspek ekonomi menunjukkan terdapat lima Kube memiliki kinerja kurang baik, tiga Kube memiliki kinerja cukup baik, dan satu Kube memiliki kinerja baik. Dilihat dari aspek sosial, menunjukkan terdapat tujuh Kube dan memiliki kinerja cukup baik dan terdapat tiga Kube memiliki kinerja kurang baik. Dilihat dari aspek kelembagaan menunjukkan terdapat lima Kube memiliki kinerja kurang baik, empat Kube memiliki kinerja cukup baik, dan satu Kube memiliki kinerja dalam kategori baik. Dari ketiga aspek kinerja Kube yang diteliti, ditemukan kelemahan pada

aspek kelembagaan dan ekonomi yang terindikasi dari hasil evaluasi pada kedua aspek ini berada dalam kategori kurang baik.

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Kube diantaranya semangat anggota kelompok yang tinggi, kuatnya rasa kebersamaan, adanya pendamping yang kompeten, adanya dukungan masyarakat, adanya dukungan SDA, dan potensi lokal serta nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar anggota Kube. Faktor penghambat pelaksanaan Kube diantaranya rendahnya kualitas SDM sasaran (pendidikan rendah dan keterampilan dalam mengelola usaha terbatas), kendala geografis, dan nilai sosial-budaya yang kurang kondusif, serta kemampuan membangun *networking* masih lemah.

Rekomendasi, 1) Kementerian Sosial (Dirjen Dayasos, Pusdiklat, dan B2P2KS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kube, khususnya dari aspek ekonomi dan kelembagaan terbukti kurang baik, sementara aspek sosial menunjukkan hasil cukup. Agar kinerja Kube relatif lebih baik, maka direkomendasikan kepada Kementerian sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan agar dalam penyusunan program pemberdayaan keluarga miskin, di samping menekankan pada pengembangan aspek sosial juga menekankan pada pengembangan aspek ekonomi dan kelembagaan dalam porsi seimbang. Bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kesos) dalam pelaksanaan persiapan pemberdayaan (diklat) terhadap sasaran Kube juga perlu dialokasikan waktu yang cukup, materi-kurikulum yang relevan, sarana-prasarana yang relatif memadai dan praktik lapangan yang cukup sehingga Keluarga Binaan Sosial (KBS) dapat lebih memahami bagaimana mengelola Kube dengan baik. Demikian juga dalam peningkatan SDM pendamping Kube, hendaknya menggunakan fasilitator/narasumber/praktisi yang memiliki kompetensi memadai dan memiliki pengalaman praktis dalam bidang pendampingan, sehingga ilmu/materi yang diberikan kepada sasaran lebih aplikatif (tidak teoritis).

2) Dinas Sosial. Dalam proses seleksi atau persyaratan anggota Kube perlu mempertimbangkan kriteria, terutama kriteria

usia. Sasaran penerima program Kube hendaknya diprioritaskan pada keluarga miskin berusia produktif. Hal ini karena untuk mengelola kegiatan ini membutuhkan stamina yang prima, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Perlu pembaharuan dalam keanggotaan Kube (kriteria anggota), dalam arti dalam satu Kube perlu ada anggota yang tidak miskin tetapi peduli dan dapat membina Kube. Komposisi yang ditawarkan adalah 8:2. Kehadiran anggota dari kelompok non-miskin ini diharapkan dapat memperkuat lembaga Kube.

Perlu peningkatan koordinasi (program) dengan instansi terkait, baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan maupun dalam pengembangan Kube. Perlu ada pendampingan dan peningkatan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk mencapai hasil usaha dan perkembangan Kube yang optimal. Perlu peningkatan kelengkapan sarana-prasarana, pengadaan insentif yang memadai bagi pendamping dan waktu pendampingan yang intensif dalam rangka menunjang perkembangan Kube. Perlunya peningkatan kualitas KBS agar dapat memiliki kemampuan pengelolaan usaha (manajerial) Kube, kemampuan mengakses sumber daya sosial ekonomi, kemampuan mengakses peluang pasar, dan kemampuan menjalin kemitraan usaha (*networking*).

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Biro Pusat Statistik, 2009-2016. *Statistik Indonesia* dan *Susenas*. Jakarta: BPS RI
- Bagong Suyanto, 1995. *Lingkaran Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Jakarta: Erlangga University Press.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 1996. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.
- , 1997. *Laporan Menteri Sosial RI pada Sidang Kabinet Terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan*, Jakarta: Depsos RI

- , 1997. *Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.
- , 1997. *Prokesos*, Jakarta: Depsos RI
- , 2003. *Indikator Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI.
- , 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Depsos RI
- , 2003. *Profil KUBE Berkembang*, Jakarta: Departemen Sosial.
- , 2003. *Profil Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI
- , 2003. *Mewujudkan Kemandirian Keluarga Melalui KUBE KMM*, Jakarta: Depsos RI.
- , 2003. *Panduan Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri*, Jakarta: Depsos RI
- , 2003. *Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Depsos RI
- , 2004. *Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Melalui KUBE dan LKM*, Jakarta: Depsos RI
- Heru nugroho, 2000. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan. .
- Sutrisno Hadi, 1991. *Metodologi Research Jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset
- Sunit agus Cahyono. 2010. *Perubahan Sosial dalam Srtuktur Keluarga Migran Domestik dan Lintas Negara pada Penduduk Miskin Pedesaan*. Yogyakarta: B2P3KS
- Tjahya Supriyatna, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: PT Humaniora Utama Press
- Warto, dkk, 2013 *Podel Penanggulangan Kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama dalam Mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS

Peraturan Perundang-undangan

- Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*
- Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000- 2004*.
- Undang-Undang No 11/ 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*